

## Studi Efektivitas Pemanfaatan Sarana Lingkungan Pada Pusat-Pusat Pelayanan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) III Kabupaten Semarang

Yustinus Bima Pramudita

Diterima: 3 Maret 2017

Disetujui: 1 September 2017

### ABSTRACT

The Region Development Unit (SWP) III with Tengaran and Suruh subdistrict service center being in the south of Semarang District. The long distance to reach the capital of Semarang district in northern, geographically less favorable for the south. It assumed SWP III more served by others. Based on the fact above, it is important to study the effectiveness of neighborhood facilities service in SWP III Semarang District. Object research includes seven neighborhood facilities according to SNI 03-1733-2004 namely government and public services, education, health, religion, trade, culture, and open space facilities. This research using the quantitative analysis with the scoring method. Variables observed in this study covering the availability, accessibility, the intensity of the use of facilities. Data collection with a questionnaire, interview, observation, and document review. Sample methods used is simple random sampling and purposive sampling. The result of this research are (1) four neighborhood facilities categories effective are religion facilities, health, the government and public service, and education, while three having effective enough are the trade facilities, culture, and open space. (2) Tengaran and Suruh Subdistrict not capable of being service center for SWP III.

**Keywords:** Effectiveness, Neighborhood Facilities, Service Center

### ABSTRAK

Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) III dengan pusat pelayanan di Kecamatan Tengaran dan Kecamatan Suruh berada di wilayah selatan Kabupaten Semarang. Jauhnya jarak untuk menjangkau ibukota Kabupaten Semarang di sebelah utara secara geografis kurang menguntungkan bagi wilayah selatan. Sehingga muncul dugaan bahwa SWP III lebih banyak dilayani oleh pusat pelayanan wilayah administrasi yang lain. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka penting untuk mengkaji efektivitas pemanfaatan sarana lingkungan pada SWP III Kabupaten Semarang. Objek penelitian mencakup tujuh sarana lingkungan menurut SNI 03-1733-2004 yaitu sarana pemerintahan dan pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan, kebudayaan, dan ruang terbuka. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan metode pembobotan. Variabel yang diamati dalam studi ini meliputi variabel ketersediaan, aksesibilitas, dan intensitas pemanfaatan. Pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, observasi dan telaah dokumen. Metode sampel yang digunakan adalah sampel acak sederhana dan sampel bertujuan. Hasil dari penelitian ini adalah (1) empat sarana lingkungan dengan kategori efektif yaitu sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana pemerintahan dan pelayanan umum dan sarana pendidikan, sedangkan tiga sarana memiliki kategori cukup efektif yaitu sarana perdagangan, sarana kebudayaan, dan sarana ruang terbuka. (2) Pusat pelayanan Tengaran dan Suruh belum mampu menjadi pusat pelayanan SWP III.

**Kata Kunci :** Efektivitas, Sarana Lingkungan, Pusat Pelayanan

<sup>1</sup> Staf Inspektorat Kabupaten Semarang, Jl. Letjend Suprpto No 7A Ungaran, Jawa Tengah  
Kontak Penulis : yust\_bima@yahoo.co.id

## PENDAHULUAN

Kebijakan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) merupakan salah satu konsep dalam perencanaan wilayah yang digunakan untuk menyebarkan kemakmuran dari pusat wilayah ke pinggirannya, sehingga wilayah di sekitarnya terpacu untuk berkembang dan mengurangi beban pelayanan yang diemban pusat kota. Kabupaten Semarang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) SWP guna mencapai pertumbuhan yang lebih baik. Ketiga SWP ini memiliki tingkat pertumbuhan yang tidak merata, hal ini disebabkan oleh kondisi fisik, sosial dan ekonomi yang berbeda. Selain itu ketiga SWP juga memiliki pusat pelayanan dengan hirarki yang berbeda, SWP I dengan pusat pelayanan Ungaran berhirarki 1 (PKL sebagai PKN), SWP II dengan pusat pelayanan Ambarawa berhirarki 2 (PKL), dan SWP III dengan pusat pelayanan Tengaran dan Suruh berhirarki 3 (PKLp).

SWP III berada di wilayah selatan Kabupaten Semarang berbatasan dengan Kota Salatiga dan Boyolali. Keberadaan ibukota Kabupaten Semarang di sebelah utara secara geografis kurang menguntungkan bagi wilayah selatan. Muncul dugaan bahwa SWP III lebih banyak dilayani oleh pusat pelayanan wilayah administrasi yang lain. Berdasarkan masalah tersebut dirumuskan bahwa pelayanan sarana lingkungan pada pusat-pusat pelayanan SWP III Kabupaten Semarang belum optimal, maka kiranya perlu untuk mengkaji efektivitas pemanfaatan sarana lingkungan pada pusat-pusat pelayanan SWP III Kabupaten Semarang.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka peneliti menetapkan langkah-langkah, sebagai berikut:

- 1) Analisis ketersediaan sarana lingkungan
- 2) Analisis aksesibilitas sarana lingkungan
- 3) Analisis intensitas pemanfaatan
- 4) Analisis efektivitas pemanfaatan sarana lingkungan

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Dalam menentukan tingkat efektivitas pelayanan sarana lingkungan di SWP III digunakan metode skoring dengan Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur persepsi/sikap seseorang terhadap suatu fenomena sosial (Sugiyono, 2013: 168). Adapun rentang nilai seperti terlihat dalam tabel 1.

**TABEL 1**  
**RENTANG NILAI EFEKTIVITAS**

Rentang Nilai	Kategori
6300 – 8100	Efektif
4500 – 6299	Cukup Efektif
2700 – 4499	Kurang Efektif

Sumber : Sugiono, 2013

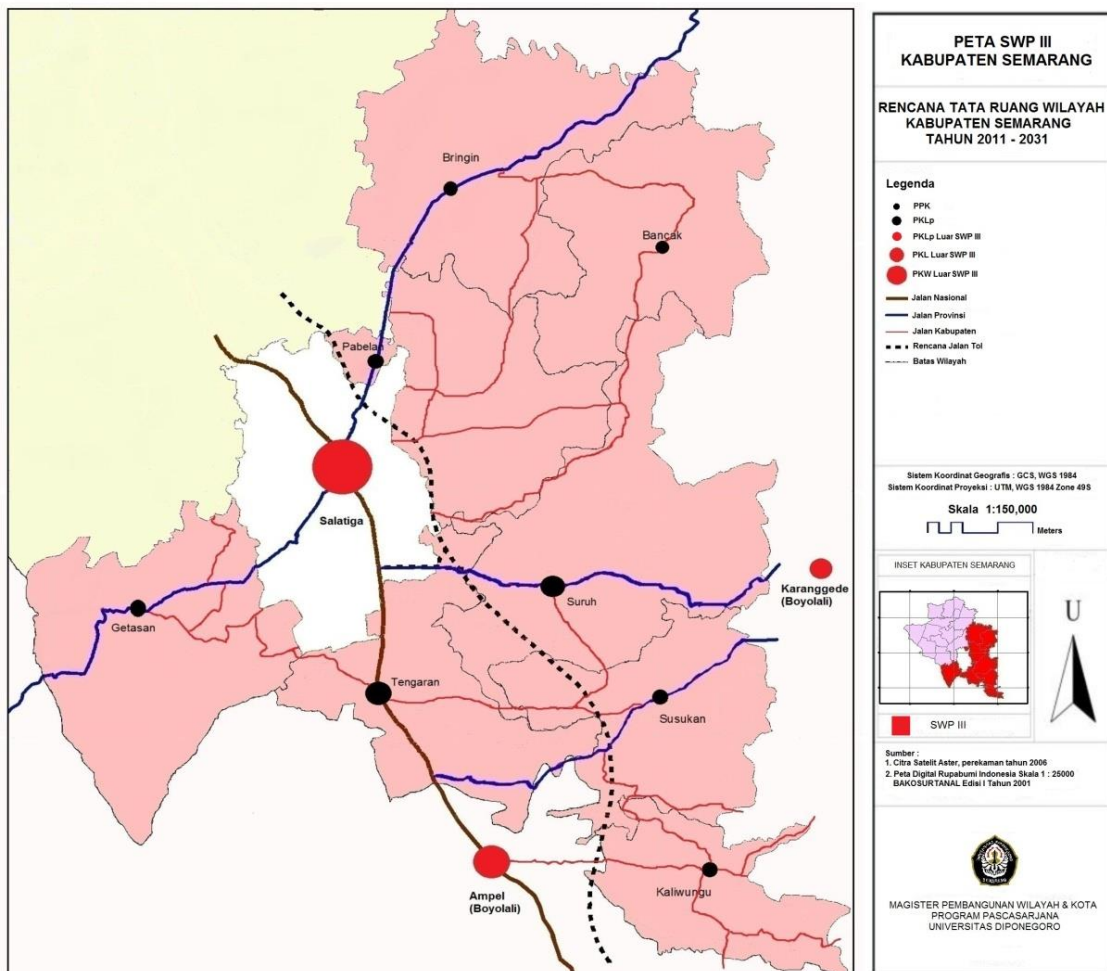
Variabel yang diamati dalam studi ini meliputi variabel ketersediaan, aksesibilitas, dan intensitas pemanfaatan. Pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, observasi dan telaah dokumen. Metode sampel yang digunakan untuk kuesioner adalah *simple random sampling* dan sampel untuk wawancara menggunakan *purposive sampling*.

### GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

Wilayah yang menjadi obyek penelitian ini adalah pusat-pusat pelayanan pada SWP III Kabupaten Semarang yang secara geografis terletak pada  $110^{\circ}24'$  sampai dengan  $110^{\circ}39'3''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}12'$  sampai dengan  $7^{\circ}30'$  Lintang Selatan. SWP III Kabupaten Semarang terbagi menjadi 6 (enam) pusat pelayanan skala kecamatan (PPK) yaitu Getasan, Susukan, Kaliwungu, Pabelan, Bringin, Bancak dan 2 (dua) pusat pelayanan skala beberapa kecamatan (PKLp) yaitu Tengarani dan Suruh sebagai pusat pengembangan SWP III (gambar 1.1). Sektor yang menonjol di SWP III adalah sektor pertanian. Pusat pelayanan yang dilalui oleh jalan nasional (arteri) hanya pusat PKLp Tengarani sedangkan pusat yang lain hanya dilalui oleh jalan provinsi dan kabupaten (kolektor).

Batas-batas wilayah SWP III Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kec. Banyubiru, Kec. Tuntang, Kec. Pringapus, Kota Salatiga.
- Sebelah timur : Kab. Grogogan, Kab. Boyolali.
- Sebelah selatan : Kab. Boyolali.
- Sebelah barat : Kab. Magelang.



Sumber : Hasil Survei, 2016

**GAMBAR 1**  
**PETA SWP III KABUPATEN SEMARANG**

## **KAJIAN MENGENAI PENGEMBANGAN WILAYAH, PUSAT PELAYANAN, SARANA LINGKUNGAN, DAN TEORI EFEKTIVITAS**

### **Pengembangan Wilayah dan Pusat Pelayanan**

Pengembangan wilayah adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah yang tersebar secara merata (Muta'ali (2014), Riyadi (2002), Soegijoko (1997), Adisasmita (2014)). Untuk mewujudkan pengembangan wilayah dibentuklah pusat-pusat pelayanan. Pusat pelayanan merupakan suatu lokasi dengan banyak sarana serta kemudahan yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi sehingga masyarakat tertarik memanfaatkan sarana yang ada di wilayah tersebut. Pusat pelayanan idealnya terletak pada lokasi dengan aksesibilitas yang baik, jumlah penduduk minimal dan memiliki jangkauan pelayanan optimal sehingga mampu melayani seluruh wilayah Christaller (1933), Lloyd (1977).

Penggolongan pusat pelayanan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, adalah:

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
- b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- d. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- e. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
- f. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
- g. Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp)

Pusat pelayanan dalam penelitian ini adalah Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu pusat pelayanan skala kecamatan dan Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp) yaitu pusat pelayanan skala beberapa kecamatan.

### **Sarana Lingkungan**

Menurut Sujarto (1989), sarana dapat diartikan sebagai suatu aktivitas ataupun materi yang berfungsi melayani kebutuhan individu di dalam suatu lingkungan kehidupan. Sementara Chapin (1995) mempunyai dua pendapat, pertama sarana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mempertimbangkan segi keuntungan yang akan diperoleh (perspektif sosial) dan yang kedua sarana direncanakan untuk meningkatkan kualitas suatu kawasan (perspektif pasar). Kelengkapan sarana yang tersedia pada akhirnya mampu menstimulasi kehidupan sosial dan ekonomi baik ke dalam maupun ke luar yaitu daerah belakangnya.

Menurut SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, sarana yang dibutuhkan dalam suatu kota kecamatan adalah sarana pemerintahan & pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan, budaya, dan ruang terbuka. Dalam SNI 03-1733-2004 sarana tersebut di atas disebut sarana lingkungan.

### **Teori Efektivitas**

Efektivitas didefinisikan sebagai keberhasilan dari suatu usaha maupun tindakan yang telah dilakukan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001). Sedangkan menurut Chapin & Kaiser (1979) yang membahas mengenai pedoman penggunaan lahan, efektivitas suatu pedoman

dapat dilihat dari kemampuannya memecahkan masalah jika pedoman tersebut dilaksanakan. Dari dua definisi diatas dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah keberhasilan dari suatu tindakan dilihat dari kemampuannya memecahkan masalah.

Kemampuan memecahkan masalah untuk pusat pelayanan meliputi ketersediaan sarana. Hal seperti yang diungkapkan oleh Yeates (1980) bahwa kemampuan suatu tempat pusat untuk memuaskan kebutuhan konsumen bergantung pada jumlah barang dan jasa yang disediakan. Hirarki kota juga mempengaruhi ketersediaan sarana, merujuk pada Christaller (Daldjoeni,1998) bahwa Kota besar memiliki hampir semua macam kegiatan pelayanan, sedangkan kota kecil memiliki jenis dan jumlah pelayanan yang terbatas.

Selain ketersediaan sarana kemampuan pusat pelayanan juga dipengaruhi oleh aksesibilitas, hal ini diungkapkan oleh Christaller (Joyodipuro, 1992) bahwa semua konsumen dalam usaha mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan, menuju ke tempat pusat yang paling dekat letaknya. Tingkat aksesibilitas ditentukan oleh beberapa faktor seperti kondisi jalan, moda transportasi, intensitas transportasi dan jarak (Tarigan, 2004).

Sementara itu menurut Golany (1976), keberhasilan penyediaan suatu sarana dapat dilihat dari munculnya keinginan masyarakat untuk memanfaatkan sarana-sarana yang telah disediakan di wilayahnya dibandingkan memanfaatkan sarana lain yang sejenis yang berada di luar wilayah.

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemanfaatan sarana lingkungan merupakan sebuah upaya untuk menilai tingkat keberhasilan penyediaan sarana lingkungan pada pusat-pusat pelayanan SWP III Kabupaten Semarang dilihat dari kemampuan yang dimiliki oleh sarana lingkungan yaitu ketersediaan sarana, aksesibilitas sarana, dan pemanfaatan sarana.

## **ANALISIS**

### **Analisis Ketersediaan Sarana Lingkungan**

Analisis ketersediaan sarana lingkungan dalam studi ini menggunakan indikator kuantitas, kualitas, kenyamanan, dan keamanan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terdapat 5 sarana lingkungan dengan kategori baik (nilai 3150 s/d 4050) yaitu sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sarana pendidikan, dan sarana kebudayaan.

Sarana peribadatan mempunyai nilai tertinggi karena sarana Masjid tersedia secara merata di semua pusat pelayanan meskipun masjid warga dan lingkungan, sedangkan masjid skala kecamatan masih kurang. Sarana kesehatan juga tersedia merata di semua pusat pelayanan, namun masih ada kekurangan untuk sarana apotek dan dokter, sehingga masyarakat masih memanfaatkan di luar SWP III. Sarana pemerintahan dan pelayanan umum menduduki posisi ketiga karena masih ada keterbatasan dalam pelayanan KTP dan pajak kendaraan, dimana kedua urusan ini dilakukan di tingkat Kabupaten. Untuk KTP sebenarnya pernah dilakukan di tingkat kecamatan, namun karena ada perubahan regulasi yaitu menjadi e-KTP maka dengan keterbatasan peralatan, pengerjaannya hanya dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang. Sementara untuk sarana pendidikan SD jumlahnya sudah mencukupi, namun untuk TK, SMP dan SMA/SMK masih kurang sehingga untuk pemenuhannya beberapa masyarakat memanfaatkan sarana di luar pusat pelayanan. Sarana kebudayaan jumlahnya sudah mencukupi, karena selain di tingkat

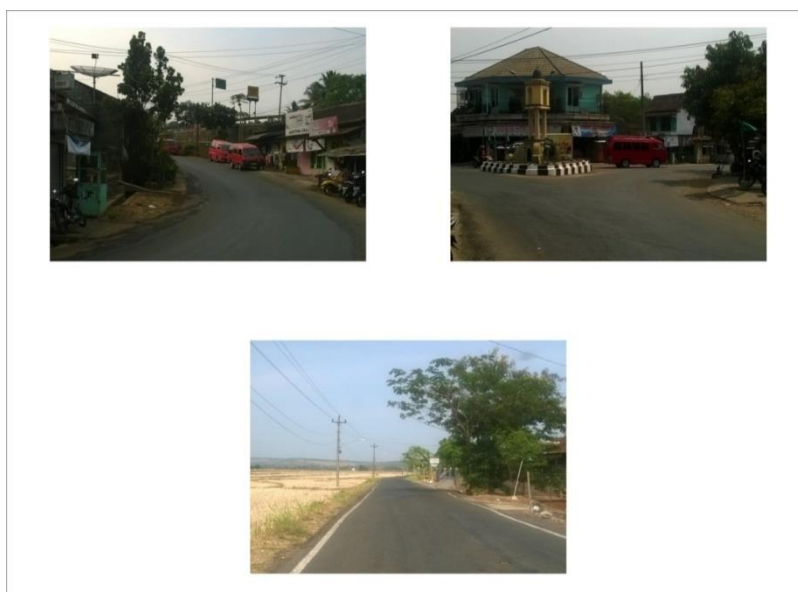
kecamatan juga tersedia di tingkat desa, namun mempunyai keterbatasan dalam peralatan penunjang.

Sedangkan 2 sarana termasuk dalam kategori cukup (nilai 2250 s/d 3149), yaitu sarana perdagangan dan sarana ruang terbuka. Sarana perdagangan mempunyai nilai ketersediaan cukup karena keterbatasan jumlah, jenis dan mutu barang yang dijual. Demikian juga untuk sarana ruang terbuka mempunyai keterbatasan jenis dan mutu sarana yang ditawarkan.

### **Analisis Aksesibilitas Sarana Lingkungan**

Analisis aksesibilitas dalam studi ini menggunakan indikator jarak tempuh, waktu tempuh, dan kondisi jalan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil 6 sarana lingkungan dengan kategori baik (nilai 1890 s/d 2430), yaitu sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana ruang terbuka, sarana perdagangan, sarana pendidikan, dan sarana kebudayaan. Sarana-sarana tersebut mempunyai nilai aksesibilitas yang baik karena tersebar merata di semua wilayah sehingga mudah dijangkau masyarakat dan didukung oleh kondisi jalan serta sarana transportasi yang ada sehingga waktu yang harus ditempuh oleh masyarakat adalah minimal.

Sedangkan untuk sarana pemerintahan dan pelayanan umum mempunyai aksesibilitas cukup (nilai 1350 s/d 1889). Kondisi ini disebabkan karena pelayanan pemerintahan belum maksimal yaitu ada beberapa urusan yang harus ditangani tingkat kabupaten, berupa pengurusan KTP dan pengurusan pajak kendaraan bermotor. Hal ini memberatkan masyarakat di SWP III karena harus menempuh perjalanan ke ibukota dengan jarak bervariasi antara 30 – 57 km.



Sumber : Hasil survei, 2016

**GAMBAR 2**  
**SARANA TRANSPORTASI DAN KONDISI JALAN DI SWP III**

### **Analisis Intensitas Pemanfaatan Sarana Lingkungan**

Analisis intensitas pemanfaatan dalam studi ini menggunakan indikator waktu pemanfaatan dan frekuensi pemanfaatan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil pemanfaatan 5 sarana lingkungan dengan kategori baik (nilai 1260 s/d 1620), yaitu sarana

peribadatan, sarana kesehatan, sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sarana pendidikan, dan sarana perdagangan. Sarana peribadatan mempunyai nilai tertinggi karena telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara untuk sarana kesehatan, pendidikan dan perdagangan beberapa masyarakat masih menggunakan pusat pelayanan Salatiga dan Boyolali terutama untuk sarana dokter dan apotek, pendidikan SMA/SMK dan pasar atau pertokoan yang besar.

Kondisi ini bisa dipahami karena ada beberapa desa lebih dekat dengan pusat pelayanan lain yang memiliki sarana yang lebih beragam, sehingga ada tarikan yang lebih kuat dengan kota tersebut, seperti masyarakat desa Nyamat, Bener, Barukan, dan Tegalwaton yang lebih kuat tarikannya dengan kota Salatiga daripada ke pusat pelayanan Tenganan. Masyarakat desa Bonomerto, Sukorejo, dan Kedungringin lebih tertarik ke Karanggede Boyolali daripada ke pusat pelayanan Suruh. Masyarakat desa Sumogawe dan Polobogo yang lebih tertarik ke kota Salatiga daripada ke pusat pelayanan Getasan. Masyarakat desa Muncar, Gentan, Bakalrejo, dan Badran lebih tertarik ke Karanggede dan Ampel Boyolali daripada ke pusat pelayanan Susukan. Masyarakat desa Popongan lebih tertarik ke kota Salatiga daripada pusat pelayanan Bringin. Masyarakat desa Sukoharjo dan Ujung-ujung lebih tertarik ke kota Salatiga daripada ke pusat pelayanan Pabelan. Masyarakat desa Pager dan Siwal yang lebih tertarik ke Boyolali daripada ke pusat pelayanan Kaliwungu. Masyarakat desa Wonokerto lebih tertarik ke Bringin daripada ke pusat pelayanan Bancak.

Sedangkan 2 sarana dengan kategori cukup (nilai 900 s/d 1259) yaitu, sarana ruang terbuka dan sarana kebudayaan. Kondisi ini disebabkan karena untuk ruang terbuka sarana di pusat-pusat pelayanan SWP III hanya berupa lapangan olah raga sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan taman, masyarakat memanfaatkan sarana kota Salatiga dan Boyolali. Untuk kegiatan kebudayaan dan kesenian, masyarakat lebih sering menggunakan ruang terbuka atau halaman rumah warga karena jenis kesenian yang membutuhkan ruang yang luas.

### **Analisis Efektivitas Pemanfaatan Sarana Lingkungan**

Efektivitas pemanfaatan sarana lingkungan merupakan sebuah upaya untuk menilai tingkat keberhasilan penyediaan sarana lingkungan pada pusat-pusat pelayanan SWP III Kabupaten Semarang dilihat dari kemampuan yang dimiliki oleh sarana lingkungan yaitu ketersediaan sarana, aksesibilitas sarana, dan pemanfaatan sarana.

Berdasarkan analisis skoring untuk ketiga variabel penelitian tersebut, terdapat 4 sarana lingkungan yang dengan kategori efektif yaitu sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana pemerintahan dan pelayanan umum, dan sarana pendidikan. Keempat sarana ini efektif karena memiliki ketersediaan dan aksesibilitas yang baik serta telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Yeates (1980) bahwa kemampuan suatu tempat pusat untuk memuaskan kebutuhan konsumen bergantung pada jumlah barang dan jasa yang disediakan. Demikian juga dengan tingkat aksesibilitas yang menurut Tarigan (2004) dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi jalan, moda transportasi, intensitas transportasi dan jarak. Sementara untuk pemanfaatan sarana seperti yang diungkapkan oleh Golany (1976) yaitu munculnya keinginan masyarakat untuk memanfaatkan sarana-sarana yang telah disediakan di wilayahnya dibandingkan memanfaatkan sarana lain yang sejenis yang berada di luar wilayah.

Sarana peribadatan menduduki urutan tertinggi dengan nilai 7328 karena tersedia secara merata di semua pusat pelayanan, sehingga mudah dijangkau dan masyarakat mempunyai banyak pilihan dalam pemanfaatannya. Sarana kesehatan dengan nilai 6838 juga tersedia

merata di semua pusat pelayanan, namun masih ada kekurangan berupa dokter dan apotek, sehingga masyarakat masih memanfaatkan di luar wilayah yaitu kota Salatiga dan Boyolali. Sarana pemerintahan dan pelayanan umum menduduki posisi ketiga dengan nilai 6615, karena masih ada keterbatasan dalam pelayanan kependudukan yaitu pelayanan KTP, dimana urusan ini dilakukan di tingkat Kabupaten. Kondisi ini memberatkan masyarakat di SWP III karena harus menempuh perjalanan ke ibukota dengan jarak bervariasi antara 30 – 57 km. Sementara sarana pendidikan mempunyai nilai 6536 karena untuk TK dan SD jumlahnya sudah mencukupi, namun untuk jenjang SMP dan SMA/SMK masih kurang, sehingga untuk pemenuhannya beberapa masyarakat memanfaatkan sarana di luar SWP III, yaitu di kota Salatiga dan Boyolali.

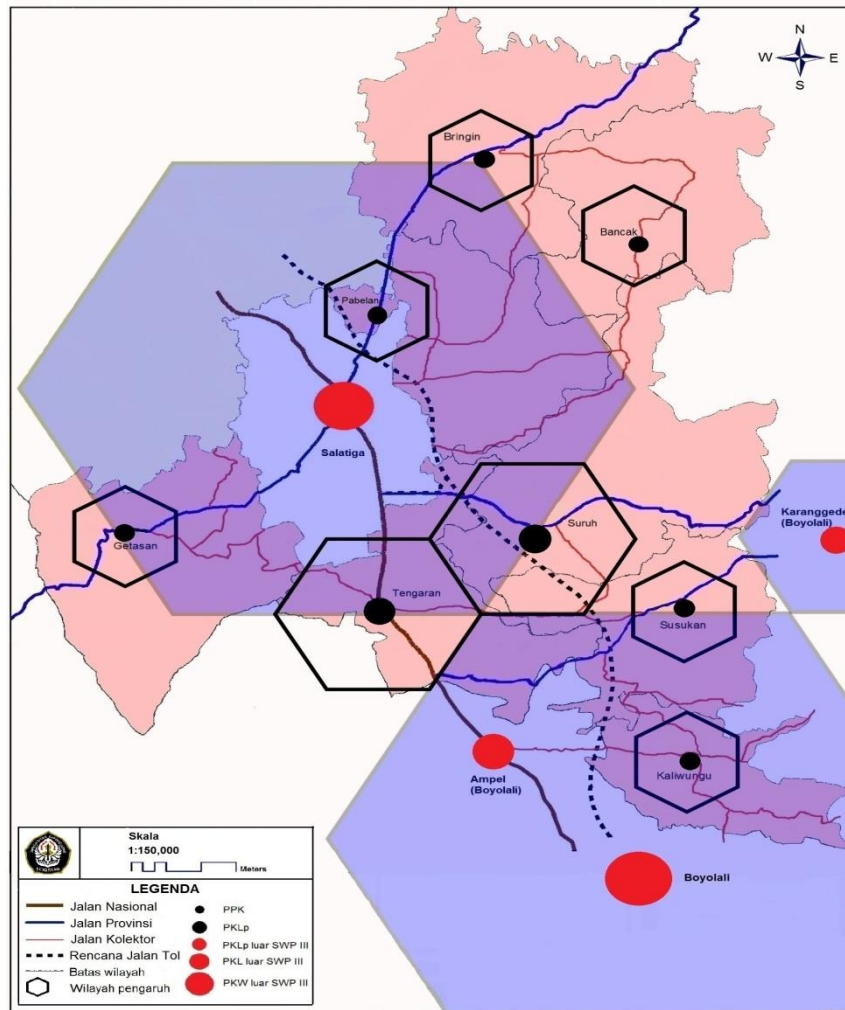
Sedangkan 3 sarana yaitu sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan sarana ruang terbuka mempunyai kategori cukup efektif. Ketiga sarana tersebut mempunyai kategori cukup efektif dengan penyebab yang berbeda. Untuk sarana perdagangan disebabkan karena ketersediaan yang kurang, sementara itu sarana kebudayaan disebabkan karena intensitas pemanfaatan yang kurang, sedangkan untuk ruang terbuka disebabkan karena ketersediaan dan intensitas pemanfaatan yang kurang.

Sarana perdagangan mempunyai nilai efektivitas 6258 karena keterbatasan barang yang dijual, sehingga untuk pemenuhan kebutuhan beberapa masyarakat memanfaatkan sarana di luar SWP III, yaitu di kota Salatiga dan Boyolali. Sementara untuk kegiatan kebudayaan dan kesenian mempunyai nilai 6170, karena masyarakat lebih sering menggunakan ruang terbuka atau halaman rumah warga karena jenis kesenian yang membutuhkan ruang yang luas. Demikian juga untuk sarana ruang terbuka di pusat-pusat pelayanan SWP III mempunyai nilai 5942 karena hanya berupa lapangan olah raga, sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan taman bermain masyarakat memanfaatkan sarana kota Salatiga dan Boyolali.

Berdasarkan hasil kuesioner, pola pergerakan masyarakat SWP III untuk memenuhi kebutuhannya bila sarana tidak tersedia di pusat pelayanan tingkat kecamatan adalah menuju ke kota Salatiga dan Boyolali. Hal ini juga dikuatkan dengan studi tinjau ulang Tatravil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Kementerian Perhubungan diperoleh data tujuan perjalanan dari Kabupaten Semarang ke Kota Salatiga sebesar 474.014 orang/tahun, sedangkan dari Kota Salatiga ke Kabupaten Semarang hanya sebesar 416.158 orang/tahun. Terlihat bahwa lebih banyak tarikan ke Kota Salatiga daripada ke Kabupaten Semarang. Demikian juga dengan tujuan perjalanan dari Kabupaten Semarang ke Kabupaten Boyolali sebesar 1.316.243 orang/tahun, sedangkan dari Kabupaten Boyolali ke Kabupaten Semarang hanya sebesar 897.473 orang/tahun. Terlihat bahwa lebih banyak tarikan ke Kabupaten Boyolali daripada ke Kabupaten Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sarana di kota Salatiga dan Boyolali tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan fisik seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.

Menurut Christaller dalam Tarigan (2008:74), pada akhirnya area perdagangan suatu komoditi akan berbentuk heksagonal atau segi enam. Antara barang pada orde yang sama, area heksagonalnya tidak akan saling tumpang tindih, tapi jika ordenya berbeda maka area heksagonalnya saling tumpang tindih. Tampak dalam gambar 3, area heksagonal Kota Salatiga dan Kabupaten Boyolali yang tumpang tindih dengan area heksagonal SWP III. Ini dikarenakan Kota Salatiga dan Boyolali mempunyai orde atau hirarki yang lebih tinggi yaitu sebagai PKW daripada pusat-pusat pelayanan SWP III yang sebagai PPK dan PKLp.





Sumber : Hasil analisis, 2016

**GAMBAR 3**  
**PETA PEMANFAATAN SARANA LINGKUNGAN**

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan untuk menilai efektivitas pemanfaatan sarana lingkungan pada pusat-pusat pelayanan di Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) III Kabupaten Semarang, dapat disimpulkan 4 sarana lingkungan yang dengan kategori efektif yaitu sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana pemerintahan dan pelayanan umum, dan sarana pendidikan. Keempat sarana ini efektif karena memiliki ketersediaan dan aksesibilitas yang baik serta telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan 3 sarana yaitu sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan sarana ruang terbuka mempunyai kategori cukup efektif. Ketiga sarana tersebut mempunyai kategori cukup efektif dengan penyebab yang berbeda. Untuk sarana perdagangan disebabkan karena ketersediaan yang kurang, sementara itu sarana kebudayaan disebabkan karena intensitas pemanfaatan yang kurang, sedangkan untuk ruang terbuka disebabkan karena ketersediaan dan intensitas pemanfaatan yang kurang. Pola pergerakan masyarakat SWP III untuk memenuhi kebutuhannya bila sarana tidak tersedia di pusat pelayanan tingkat kecamatan adalah menuju ke kota Salatiga dan Boyolali. Masyarakat tidak tertarik ke Tenganan atau Suruh,

seharusnya dengan ditetapkannya peran suatu kota menjadi pusat pertumbuhan, kota dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan di wilayah pengaruhnya, yaitu sebagai alat penahan guncangan dalam proses migrasi, sebagai penarik tandingan terhadap pusat perkotaan yang lebih besar, membantu distribusi barang dan hasil pertanian dari pusat pelayanan yang lebih kecil. Dengan demikian dapat dikatakan pusat pelayanan Tenganan dan Suruh sebagai pusat pengembangan bagi SWP III belum mampu menjadi penarik tandingan kota Salatiga dan Boyolali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita. 2014. *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Chapin, F. S. Jr. Dan E.J. Kaiser. 1979. *Urban Land Use Planning*. Urbana: Illionis University Press
- Daldjoeni, N. 1998. *Geografi Kota dan Desa*. Bandung: Penerbit Alumni
- Djojodipuro, Marsudi. 1992. *Teori Lokasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Golany, Gideon. 1976. *New Town Planning, Principles and Practice*. New York: John Wiley & Sons
- Kecamatan Dalam Angka 2013. BPS Kabupaten Semarang, 2014.
- Kuklinski, Antoni (ed). 1972. *Growth Poles and Growth Centres ini Regional Planning*. Mouton
- Muta'ali. 2014. *Perencanaan Pengembangan Wilayah berbasis Pengurangan Resiko Bencana*. Yogyakarta: BPFU Universitas Gadjah Mada
- Nazir, M. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Richardson. 2001. *Urban Economic*. Illionis: The Dryden Press, Hinsdale
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Soegijoko et al. 1997. *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Grasindo
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Jakarta: Alfabeta
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- SNI 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
- Sujarto, Joko. 1989. *Pendekatan Pembangunan Perkotaan Ditinjau dari Segi Perencanaan Lokal*. Bandung: Departemen Planologi ITB
- Tarigan, Robinson. 2004. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Yeates, 1980. *The North American City*. (Third Edition). San Fransisco: Harper and Row Publisher